

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG
KEGUNAAN APLIKASI SAKTI DI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JOMBANG**



Oleh:

Yasta Ovan Redian Syah

(2262143)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE DEWANTARA JOMBANG**

2023

**KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG
KEGUNAAN APLIKASI SAKTI DI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JOMBANG**



Oleh:

Yasta Ovan Redian Syah

2262143

Menyetujui

Pendamping Lapangan,

Nurul Khalifah, SE
NIP. 196907272005012001

Jombang, 06 September 2023
Dosen Pembimbing Lapangan

Lina Nasaharun N, SE, Maks
NIDN. 0715058501

Mengetahui



Ka. Prodi Akuntansi

Dr. Rachyu Purbowanti., MSA
NIDN. 0720026201



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jombang

Dr. H. Muhtar, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197304131999031003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya, sehingga dapat menyelesaikan laporan kuliah kerja magang (KKM) yang berjudul **“kegunaan aplikasi sakti di kementerian agama kabupaten jombang”**.

Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Magang ini, tentunya tak lepas dari arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Terkait berjalanya proses KKM ini berlangsung berjalan dengan baik. Melalui laporan ini, saya bermaksud untuk menggambarkan yang telah saya lakukan selama magang, tantangan apa yang akan di hadapi, serta prestasi apa yang akan kita capai.

Demikian kata pengantar ini saya sampaikan, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dengan baik dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman di bidang yang bersangkutan. Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, laporan KKM ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan masukan yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan laporan ini kedepanya.

Jombang, 06 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Manfaat Kuliah Kerja Magang	2
1.3 Tempat Kuliah Kerja Magang	3
1.4 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang.....	3
Bab 2 TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG.....	4
2.1 Company Profil	4
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan/instansi.....	6
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	9
Bab 3 PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG.....	11
3.1 Pelaksanaan Kerja Magang	11
3.2 Hasil Pengamatan Di Tempat Kerja	11
3.3 Landasan Teori	12
3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi	12
Bab 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	13
4.1 Kesimpulan.....	13
4.2 Saran.....	13
4.3 Refleksi diri	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.4. Kantor Kemenag Kabupaten Jombang.....	2
Gambar 2.2 struktur organisasi kementrian agama kabupaten jombang	6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran SuratKeterangan Telah Melaksanakan KKM.....	14
Form Aktivitas Harian/Log Book	12
Dokumentasi/Foto.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memperluas pengetahuan dan pengalaman serta mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia profesional. Saya dengan ini mengambil keputusan untuk mengikuti program kuliah kerja magang di lingkungan kementerian agama kabupaten Jombang. Pilihan di kementerian agama kabupaten jombang karena ingin mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan di lingkup kementerian agama Jombang. Melalui program kuliah kerja magang ini, saya berharap untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana cara tata kelola keuangan di kemenag kabupaten Jombang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam membantu pemerintahan negara.

Berdirinya departemen agama pada tanggal 3 januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945. BAB E pasal 29 tentang agama ayat 1 dan 2. Khususnya di kabupaten Jombang, maka urusan pemerintahan di bidang agama tentu setelah adanya pembentukan kabupaten Jombang dengan di terbitkannya UU No. 2 tahun 1950.

Menurut pengamatan mulai masa pemerintahan tersebut instansi ini merupakan jawatan agama yang secara terus menerus mengalami perubahan nama seperti 1. Inspeksi Urusan Agama / Insura, sedang bidang kependidikan yaitu Inspeksi Pendidikan Agama / Inspendag. Kemudian berubah nama menjadi, 2. Dinas Urusan Agama / Dinura, untuk bidang kependidikan yaitu Dinas Pendidikan Agama / Dipenda dan kemudian berubah lagi, 3. Kantor Pendidikan Agama / Kapendag,

dan terakhir berubah menjadi. Kantor Departemen Agama / Kandepag sampai dengan sekarang.

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang

1. Dapat memberikan manfaat tentang bagaimana cara menghadapi dunia kerjayang baik dan benar
2. Dapat menambah pengetahuan cara penggunaan aplikasii sakti dengan baik
3. Menambah wawasan pengetahuan tentang cara tata kelola keuangan padaaplikasi sakti
4. Dapat megetahui pengoperasian aplikasi sakti dengan baik

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang

1. Dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana kita cara mengatasi masalah di dunia kerja sebelum masuk di dunia kerja sesungguhnya.
2. Dapat menambah pengetahuan cara pengoperasian aplikasi SAKTI dengan baik dan benar dengan standart pengoperasian.
3. Dapat menambah wawasan pengeahuan tentang tata kelola keuangan pada aplikasi sakti dengan baik dan benar
4. Dapat mengetahui pengoperasian aplikasi sakti dengan baik sehingga kita tidak merasa kebingungan.

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang

Nama Perusahaan : Kementrian Agama Kabupaten Jombang.
Alamat Perusahaan : Jl. Bupati R. Soedirman No.26, Jombang, Kec.
Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419.
Telepon 0321861321



Gambar 2.4.1 Kantor Kemenag Kabupaten Jombang

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat	Pakaian
Senin-selasa	7.30 – 15.00	12.00 – 13.00	Putih hitam dan menggunakan almamater
Rabu – Kamis	7.30 – 15.00	12.00 – 13.00	Batik dan menggunakan almamater
Jum'at	7.30 – 15.00	12.00 – 13.00	Bebas asal sopan

BAB II

Tinjauan Umum Tempat Kuliah Kerja Magang

2.1 Company Profil

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama.

Menurut Yamin, “Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Salah satu anggota PPKI yang menolak pembentukan Kementerian Agama ialah Mr. Johannes Latuharhary.

Diungkapkan oleh K.H.A. Wahid Hasjim sebagaimana dimuat dalam buku Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar (Kementerian Agama, 1957: 856), “Pada waktu itu orang berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Lebih lanjut Wahid Hasjim menulis, “Setelah berjalan dari Agustus hingga November tahun itu juga, terasa sekali bahwa soal-soal agama yang di dalam prakteknya bercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tangan (departemen) tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan terasa perlu sekali berpusatnya soal-soal keagamaan itu di dalam satu tangan (departemen) agar soal-soal demikian itu dapat dipisahkan (dibedakan) dari soal-soal lainnya. Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan Parlemen Indonesia periode 1945-1950, sidang pleno dihadiri 224 orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah).

Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan.

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.

Pembentukan Kementerian Agama pada waktu itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya.”Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggung jawaban, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri.

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah.

Perkembangan berikutnya

Peralihan kekuasaan kepada Pemerintah RI menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi kementerian. Pada tanggal 23 April 1946, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat yang isinya :

Pertama, Shumuka yang dalam zaman Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Jawatan Agama Daerah, yang selanjutnya ditempatkan di bawah Kementerian Agama.

Kedua, hak untuk mengangkat penghulu Landraad (sekarang bernama

Pengadilan Negeri), ketua dan anggota Raad Agama yang dahulu ada di tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Ketiga, hak untuk mengangkat penghulu masjid, yang dahulu ada tangan Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Pada waktu memperingati 10 tahun berdirinya Kementerian Agama, tahun 1956, Menteri Agama K.H.

Kondisi saat ini

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, saat ini Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon I yaitu : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan kehalalan dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Kedepannya apabila diperlukan, maka BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Saat ini, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi antara lain :

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama; pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agamadan keagamaan;
pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Sejarah Perkembangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang berdiri sendiri memisahkan dari Kabupaten Mojokerto pada tahun 1910, dimana pada waktu itu Kabupaten Mojokerto dibawah pemerintahan Bupati R.A. Ario Kromodjojo Adinegoro. Sebagai bupati Jombang pertama adalah R.A.A Soeraadiningrat, yang sebelumnya menjadi Adipati Sedayu tahun 1889-1910. Pada tahun 1972 ditemukan sebuah laporan bupati Mojokerto R.A Ario Kromodjojo Adinegoro, kepada asisten Residen Jombang tanggal 25 Januari 1898 mengenai keadaan Trowulan (suatu Onderdistrict Afdeeling Jombang) pada tahun 1880. dengan demikian, kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya tidak dimulai dari berdirinya Kabupaten Jombang yaitu tahun 1910 tersebut. melainkan bahkan sebelum 1898. pada saat itu Trowulan sudah menjadi Onderdistrict Afdeeling Jombang, walaupun Kabupaten Jombang masih menjadi satu kabupaten dengan Mojokerto. Pembentukan kabupaten Jombang sebagai daerah otonom bersama 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten lainnya di Jawa Timur diawali dengan penerbitan undang- undang nomor 2 tahun 1950 tentang pembentukan propinsi Jawa Timur. Kemudian pembentukan propinsi Jawa Timur ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat dengan pembentukan kabupaten yang ada diwilayah Jawa Timur yang dituangkan dalam undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Timur.

Sudah barang tentu sejak adanya kegiatan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas maka seluruh aspek kepentingan di masyarakat akan diatur oleh

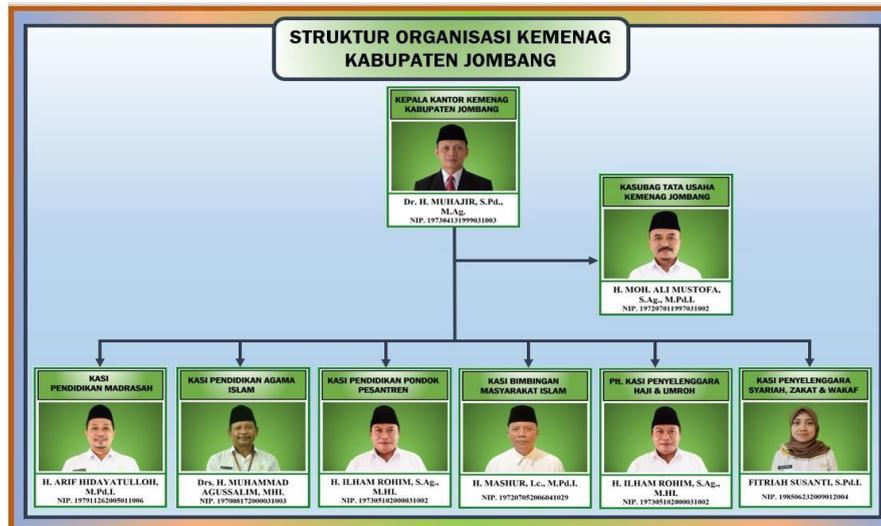
pemerintah pada saat itu, termasuk urusan keagamaan bagi masyarakat Jombang. Namun dengan diproklamirkannya Republik Indonesia tahun 1945 maka secara de facto maupun de jure segala kegiatan pemerintahan beralih menjadi pemerintahan republik ini.

Dengan demikian urusan agama bermetamorfose menjadi sebuah Departemen Agama. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi pancasila dan UUD 1945. ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2.

Khususnya di Kabupaten Jombang, maka urusan pemerintahan dibidang agama tentu setelah adanya pembentukan kabupaten Jombang Dengan diterbitkannya UU No. 2 tahun 1950. menurut pengamatan penulis mulai masa pemerintahan tersebut instansi ini merupakan jawatan Agama yang secara terus menerus mengalami perubahan nama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

- Inspeksi Urusan Agama / Insura, sedang bidang kependidikan yaitu Inspeksi Pendidikan Agama / Inspendag. Kemudian berubah nama menjadi,
- Dinas Urusan Agama / Dinura, untuk bidang kependidikan yaitu Dinas Pendidikan Agama / Dipenda dan kemudian berubah lagi,
- Kantor Pendidikan Agama / Kependag, dan terakhir berubah menjadi Kantor Departemen Agama / Kandepag sampai dengan sekarang.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan/instansi



2.2.1 struktur organisasi kementerian agama kabupaten jombang

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Bidang agama

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salahsatu pilar kerukunan nasional.

Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas danmerata.

Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.

Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan danakuntabel.

Bidang pendidikan

Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadappendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).

Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.

Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

Tugas :

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi :

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi : Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dll, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;

Pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama ;

Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;

Pelaksanaan penyelenggaraan organisasi jaminan produk halal; dan

Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur di lingkungan.

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1 Pelaksanaan Kerja Magang

Sistem aplikasi SAKTI ini digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggung jawaban anggaran. Dalam aplikasi sakti ini kita bisa membuat surat perintah seperti pembuatan SPP (surat perintah pembayaran), pembuatan SPM (surat perintah membayar) dan pencatatan SP2D (surat perintah pencairan dana).

Alur Proses Pencairan dana Instansi Kemenag Jombang.

* Pembuatan SPP yang disetujui dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka selanjutnya SPP di proses menjadi SPM dan setelah SPM di validasi dan di tanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM maka SPM dapat di sampaikan ke KPPN (kantor pelayanan perbendaharaan negara), selanjutnya KPPN akan memproses pengajuan SPM kalau semua persyaratan sudah valid dan lengkap maka dana pengajuan SPM bisa dicairkan.

3.2 Hasil Pengamatan Di Tempat Kerja

Berdasarkan hasil pengamatan kuliah kerja magang ini sistem aplikasi SAKTI sangat berguna di bagian keuangan di kementerian agama kabupaten Jombang. Dalam sistem aplikasi SAKTI ini dapat mencetak SPP (surat perintah pembayaran) dan SPM (surat perintah membayar). Penulis di tugaskan di bagian keuangan secara umum tugas yang dikerjakan adalah pengerjaan dari SPP kemudian di proses sampai menjadi SPM.

Dalam SPM di bedakan menjadi 3 akun yaitu; akun 51, akun 52 dan akun 53.

Akun 51 (Belanja pegawai)

Contoh; gaji, uang makan, tunjangan kinerja

Akun 52 (Belanja Barang)

Contoh; operasional kebutuhan kantor, listrik, internet dan lain-lain.

Akun 53 (Belanja Modal)

Contoh; belanja yang bisa menjadi aset (komputer, bangunan, meja, kursi dan lain-lain)

Penyusun laporan keuangan bertugas mencatat semua transaksi untuk mejadi laporan

keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan terbagi menjadi 2 tahapan;

Tugas rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan

Menyusun laporan keuangan setiap triwulan

Triwulan 1 (jangka waktu 3 bulan)

Triwulan 2 (jangka waktu 6 bulan)

Triwulan 3 (jangka waktu 9 bulan)

Triwulan 4 (jangka waktu 12 bulan)

3.3 Landasan Teori

Sistem aplikasi SAKTI ini digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggung jawaban anggaran. Dalam aplikasi sakti ini kita bisa membuat surat perintah seperti pembuatan SPP (surat perintah pembayaran) dan pembuatan SPM (surat perintah membayar).

Sistem aplikasi SAKTI berguna bagi bendahara untuk; pemindahan kas bendahara pengeluaran, mencatat pembayaran dana titipan dan setoran pengembalian belanja.

3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi

Di setiap tempat kerja pasti tidak luput dari masalah atau kendala. Maka dari itu dari hasil pengamatan selama magang di kementrian agama kabupaten Jombang ini ada kendala yang membuat sistem kinerja karyawan menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu cara menghindari masalah tersebut kita harus berhati-hati dalam menginput data tersebut supaya tidak kehilangan data, maka file tersebut di print terlebih dahulu kemudian di scan semisal file hilang masih punya data tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kementrian agama kabupaten Jombang ini merupakan institusi pemerintahan yang berada di naungan kementrian agama pusat, dalam mengatur jalanya kualitas keagamaan dan pengamalan agama dalam menciptakan kerukunan antar umat.

Tujuan kementrian agama kabupaten Jombang;

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah.
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan antar umat.
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan.
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas.
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani responsif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan kuliah kerja magang yang saya lakukan di Kementrian Agama Kabupaten Jombang ini ada saran perbaikan untuk mengelompokkan nomor data terlebih dahulu supaya tidak kebingungan saat penyatuan dari SPP dengan SPM. Saran ini bermaksud untuk mempermudah saat penyatuan dari SPP dengan SPM.

4.3 Refleksi Diri

Di dalam perkuliahan magang ini penulis mendapatkan materi tentang penggunaan sistem aplikasi SAKTI di kantor kementrian agama kabupaten Jombang. Dalam sistem aplikasi sakti ini sangat berguna untuk pembuatan SPP dan SPM. Pembuatan SPP yang disetujui dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka selanjutnya SPP di proses menjadi SPM dan setelah SPM di validasi dan di tanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM maka SPM dapat di sampaikan ke KPPN (kantor pelayanan perbendaharaan negara), selanjutnya KPPN akan memproses pengajuan SPM kalau semua persyaratan sudah valid dan lengkap maka dana pengajuan SPM bisa dicairkan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://kemenagkabjombang.my.id/>

<https://kemenagkabjombang.my.id/struktur-kankemenag/>

Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa/ LOG BOOK

Nama : Yasta Ovan Redian Syah
 Nim : 2262143
 Tempat KKM : Kementerian Agama Kabupaten Jombang
 Bagian/Bidang : Keuangan

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	10 Juli 2023	Perkenalan anggota/ staff Penentuan bagian	
	11 juli 2023	Membantu laporan keuangan	
	12 juli 2023	Membantu laporan keuangan	
	13 juli 2023	Membantu rekapitulasi kehadiran pns	
	14 juli 2023	Membantu rakapitulasi kehadiran pns	
2	17 juli 2023	Rekapitulasi perhitungan uang makan	
	18 juli 2023	Rekapitulasi perhitungan uang makan	
	19 juli 2023	Libur Nasional Tahun baru hijriyah	
	20 juli 2023	Rekapitulasi kehadiran pns	
	21 juli 2023	Membantu laporan keuangan	
3	24 juli 2023	Surat perjalanan dinas Menyatukan SPP dengan SPM	
	25 juli 2023	Menyatukan SPP dengan SPM Rekapitulasi uang makan pns	
	26 juli 2023	Biaya perjalanan dinas	
	27 juli 2023	Nominatif perjadiin	
	28 juli 2023	Laporan saldo rekening p3k	

4	31 juli 2023	Laporan pengajuan rekomendasi TTE sater	
	1 agustus 2023	Laporan KUA se kabupaten Jombang	
	2 agustus 2023	Permohonan TTE man 5 Jombang	
	3 agustus 2023	Laporan dana KPRI bahagia	
	4 agustus 2023	Rincian penggunaan dana ganti uang persediaan tahun anggaran 2023	
5	7 agustus 2023	Mengisi daftar permintaan perjalanan dinas anggran 2023	
	8 agustus 2023	Rekapitulasi uang makan	
	9 agustus 2023	Menyatukan SPP dengan SPM	
	10 agustus 2023		
	11 agustus 2023	Nominatif pejadiin	
6	14 agustus 2023	Membantu membuat laporan SPP dan SPM	
	15 agustus 2023	Membantu laporan SPP dan SPM	
	16 agustus 2023	Membantu laporan keuangan	
	18 agustus 2023	Membantu laporan keuangan	
7	21 agustus 2023	Membantu laporan keuangan	
	22 agustus 2023	Menyatukan SPP dengan SPM	
	23 agustus 2023	Membantu rincian penggunaan dana ganti uang persediaan	
	24 agustus 2023	Membantu laporan SPP dan SPM	
	25 agustus 2023	Membantu laporan SPP dan SPM	
8	28 agustus 2023	Membantu laporan SPP dan SPM	

	29 agustus 2023	Opname fisik barang inventaris	
	30 agustus 2023	Opname fisik barang inventaris Laporan ketersediaan dana detail	
	31 agustus 2023	Opname fisik barang inventaris	
	1 agustus 2023	Opame fisik barang inventaris	
9	4 september 2023	Pembelian barang sekolah MIN se kab Jombang	
	5 september 2023	Membantu permohonan admin TTE Nominatif perjadiin	
	6 september 2023	Membantu penggunaan dana BOP bulan september 1 (tahap 14)	
	7 september 2023	Mengaplud penggunaan dana BOP di aplikasi sakti Membantu membuat laporan spp	
	8 september 2023	Membantu laporan keuangan Menyatukan spp dengan spm	

Jombang, 06 September 2023

Pendamping Lapangan



Nurul Khalifah, SE

NIP. 196907272005012001



BKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG
Jalan Bupati R. Soediman Nomor 26 Jombang Kode Pos 61419
Telepon (0321) 861321
Website: www.kemenagkabjombang.my.id; E-mail: kabjombang@kemenag.go.id

SERTIFIKAT

Nomor : 097 / Kk.13.12.1/HM.01/09/2023

Bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : YASTA OVAN REDIAN SYAH
NIM : 2262143
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
PGRI Dewantara Jombang

Telah menyelesaikan Kuliah Kerja Magang (KKM) pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Jombang mulai tanggal 10 Juli s/d 10
September 2023 dengan predikat :

SANGAT BAIK

Dengan daftar nilai yang tercantum dibalik sertifikat ini.



Jombang, 21 September 2023
Kepala Kantor,

Dr. H. Muhajir, S.Pd. M.Ag
NIP. 197304131999031003



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA
PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (BAIK SEKALI)
PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)

Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807 Jombang 61471
Email : info@stiedewantara.ac.id website : www.stiedewantara.ac.id

PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA

Nama : Yasta Ovan Redian Syah
NIM : 2262143
Program Studi : Akuntansi
Tempat magang : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang
Bagian/Bidang : Keuangan

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai (0 - 100)
1.	Keaktifan konsultasi	86
2.	Motivasi	86
3.	Pengetahuan tentang tugas dalam obyek KKM	86
4.	Tata Bahasa dan kerapihan laporan	86
5.	Kejelasan menyampaikan laporan	86
6.	Sistematika laporan	86
7.	Kemampuan mengidentifikasi masalah	86
8.	Kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah	86
Jumlah		86
Nilai Rata-Rata (Jumlah : 8)		86

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka

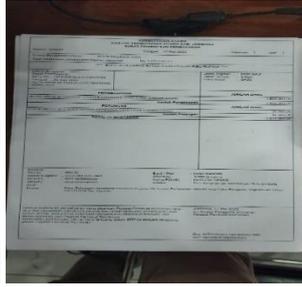
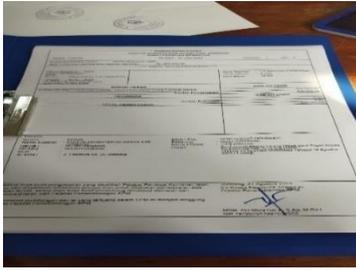
Jombang, 06 September 2023

Dosen Pembimbing Lapangan,

(Lina Nasihatun Nafidah, SE, M.Aks)

NIDN. 0727119002,

LAMPIRAN



Laporan spp dan spm, disertai penyatuan spp dengan spm



Membantu laporan keuangan

Logo of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Directorate of Health Services, Jember District.

Kantor Kesehatan Wilayah ALLAMA
KEMUPATYAN JEMBER

Surat Perijalan Dinas (SPD)

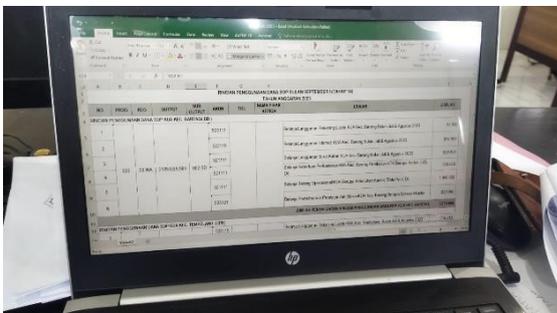
1. Pejabat Pembuat Keputusan	Leidy Evertine Henna, S.Pd., M.Si	
2. Nomor NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Dr. H. Dwiandriyanto, M.Ag NIP. 072601214990041004	
3. a. Tanggal berangkat	a. Perumahan YSI I (TV/16)	
b. Tujuan perjalanan	b. Singgih	
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c. Biaya	
4. Maksud Perjalanan Dinas	Mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Magang Koordinasi	
5. Alat angkutan yang digunakan	Kendaraan sendiri	
6. a. Tempat berangkat	a. Kabupaten Jember	
b. Tujuan Tujuan	b. Singgih	
c. Tanggal Perjalanan Dinas	c. 1 Hari	
d. Tanggal berangkat	d. 12 Oktober 2021	
e. Tanggal berakhir/ bila di tempat lain (*)	e. 13 Oktober 2021	
8. Pengantar : Nama	Tanggal lahir	Keterangan
1. /		
2. /		
3. /		
4. /		
9. Penyetor Anggaran :		
a. Instansi	a. Kantor Kecamatan Ajiwara Kab. Jember	
b. Akun	b.	
10. Keterangan Lain-lain		

*) Ciri-ciri tanda pokok

Dikeluarkan di : Jember
Tanggal : 13 Oktober 2021
Pejabat Pembuat Keputusan

Leidy Evertine Henna, S.Pd., M.Si
NIP. 197807012000042014

Membantu membuat surat perjalanan dinas



Membantu laporan penggunaan BOP bulan september tahun anggaran 2023

